

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beban utang luar negeri yang sangat besar ini telah mengikis kapabilitas pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan publik yang tercermin di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Utang luar negeri Indonesia sudah menjadi beban kronis dari APBN sehingga anggaran negara tersebut tidak memiliki ruang yang memadai untuk manuver demi pemenuhan kebutuhan publik.

Sementara itu APBN pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang sangat penting yang bisa dipakai untuk kepentingan ekonomi masyarakat luas, terutama kepentingan ekonomi rakyat. Tercatat rata-rata 26-30 persen dari APBN setiap tahunnya dialokasikan untuk membayar utang, sedangkan untuk sektor pendidikan selalu di bawah 10 persen dari APBN yang dialokasikan untuk memenuhi sektor publik yang sangat vital ini. Pada APBN tahun 2006 misalnya, pemerintah mengalokasikan sebesar 26% atau sebesar Rp. 139 triliun untuk membayar beban utang.

CGI sejak tahun 1992, adalah kelompok donor dipimpin Bank Dunia yang memberikan pinjaman dan hibah kepada negara yang mengajukan permohonan. Kelompok konsultatif berperan sebagai koordinator donor dan sebagai wahana untuk bekerja dengan negara yang memohon untuk memusatkan perhatian pada bidang-bidang pokok tertentu. Kelompok konsultatif biasanya bertemu sekali setahun. Meskipun di beberapa negara yang mengalami masalah serius, pertemuan dapat diselenggarakan lebih dari sekali dalam satu tahun. Negara donor dan lembaga keuangan internasional mengadakan pembahasan dalam pertemuan kelompok konsultatif untuk menyetujui pemberian pinjaman dan hibah kepada negara yang mengajukan permohonan bantuan, biasanya dikucurkan pada tahun fiskal berikutnya

Seperti halnya dengan IMF, selama ini Indonesia memerlukan CGI untuk memperoleh utang yang akan dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran

(APBN). Oleh karena itu, CGI sebagai aid coordinator lebih cenderung sebagai forum rutin yang biasanya dilakukan dalam masa ketika Pemerintah akan menyusun rencana anggaran (RAPBN). Seperti halnya juga perjanjian dengan IMF, maka untuk mendapatkan utang tersebut, Pemerintah Indonesia harus melewati proses konsultasi dengan CGI. Proses konsultasi ini akan menghasilkan penilaian terhadap kinerja ekonomi Indonesia dan seberapa besar Pemerintah Indonesia mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati pada pertemuan CGI sebelumnya. Penilaian ini akan menentukan besarnya pinjaman dan persyaratan-persyaratan (*conditionality*) berikutnya yang harus dipenuhi Indonesia.

Selama sepuluh tahun keberadaannya, CGI telah berperan dalam menopang proses dan pembiayaan pembangunan Indonesia melalui berbagai bantuan dan utang yang di berikan. Dalam perkembangannya terlebih sejak krisis multidimensi yang menimpa Indonesia akhir dasawarsa 1990an terdapat pergeseran dan perubahan dalam forum tersebut. mencakup mekanisme kerja, agenda dan isu yang di bahas dalam pertemuan, skema beserta persyaratan pinjaman dan hibah yang di berikan namun Forum CGI juga bukan merupakan forum setara antara negara dan lembaga pemberi utang dan Indonesia sebagai penerima utang. Forum tersebut tidak lebih dari forum untuk memberikan desakan kebijakan kepada pemerintah Indonesia, memonitor pelaksanaan kebijakan yang didesakan dan menerima laporan pelaksanaan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

Selain desakan dan tekanan, forum CGI lebih banyak sebagai forum laporan rutin tahunan pemerintah Indonesia terhadap negara kreditor dan Lembaga Keuangan Internasional dalam pelaksanaan agenda yang di saratkan dan dikondisikan anggota CGI. Meski Indonesia sudah lepas dari IMF, namun CGI lah yang mengontrol, monitoring dan pengawasan keberlanjutan program dari IMF, menjadi catatan IMF masih terlibat aktif dalam pertemuan forum CGI sampai pertemuan akhir CGI sebelum dibubarkan pada tahun 2007, yakni pertemuan CGI ke 15 di Jakarta.

Konsensus Washington dikenal juga sebagai nilai-nilai dasar dari neoliberalisme ekonomi yang menyelinap dalam globalisasi. Globalisasi dalam rangka penyebaran neoliberalisme itu memperlihatkan 2 (dua) dimensi yakni,

pertama dimensi ekonomi dan korporasi (*economic and corporation globalization*). Kedua, dimensi politik dan negara (*political and state globalization*). Kedua dimensi tersebut nampak pada kebijakan yang diskenariokan dan didesain oleh negara-negara maju dan mesin globalisasi yaitu, pertama lembaga keuangan internasional (*International Financial Institutions/IFI's*), kedua Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), dan ketiga perusahaan multinasional (*Multinational Corporation/MNC*) serta keempat melalui kartel kreditor untuk negara berkembang dengan kedok *aid coordinator*, seperti CGI dalam konteks Indonesia. Mesin-mesin globalisasi di atas, negara-negara maju semakin memperkokoh hegemoni mereka untuk mengatur dan mengontrol sumberdaya di dunia.

Sebagaimana perkembangannya di seluruh dunia, agenda neoliberalisme di Indonesia hanya merupakan suatu tahap saja dari kapitalisme. Neoliberalisme adalah konsep paling mutakhir dari kapitalisme, dalam arti yang mendominasi perwujudannya saat ini. Sebagai suatu aliran pemikiran, neoliberalisme memiliki akar pada gagasan kapitalisme yang awal. Sebagai suatu agenda (terutama dalam mekanisme dan sistem ekonomi).

Dalam penerapannya konsensus Washington, memberikan resep berupa persyaratan-dan penkondisian yang tekanan dan kondisionalitas tersebut tercantum dalam paket *Structural Adjustment Program* (SAP). Dalam SAP sangat memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan Konsensus Washington sebagai bentuk perluasan kapitalisme, baik melalui Lembaga Keuangan Internasional, maupun konsorsium pemberi utang dan hibah para negara kreditor seperti CGI.

Utang yang dalam hal ini diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen untuk menjawab tentang ketertinggalan pembangunan ekonomi di tingkat domestik justru menjebak kelompok negara ini dalam problem yang berkepanjangan karena implikasi dari ketentuan dan aturan yang patut dipatuhi di tingkat struktural sebagai konsekuensi logis dari utang yang di lucurkan.

Utang luar negeri melahirkan ketergantungan negara berkembang terhadap para negara dan lembaga kreditor, seperti Indonesia, bahkan menciptakan masalah utang yang berkelanjutan. Bahkan indikasi Indonesia sudah masuk dalam *debt trap*, yakni keterjebakan dalam utang yang melahirkan banyak konsekuensi

secara ekonomi maupun politik hingga mewujudkan *cultural gap*. ULN juga melahirkan *fisher paradox*, yang tiada lain keterkungkungan Indonesia dalam utang, tamal sulam APBN dalam meminta dan membayar utang tiap tahun nya, sehingga kebijakan Anggaran ketat, privatissi dan pencabutan subsidi menjadi konkwensi paling rasional dalam pembayaran ULN. Hal inilah yang membuat Indonesia sangat tergantung terhadap utang luar negeri, tidak bisa keluar, ibarat *vicius circle*.

Konstruksi neoliberalisme, secara tidak langsung melahirkan hegemoni, yakni sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsesus ketimbang melalui penindasan terhadap klas sosial lainnya. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Karena itu hegemoni pada hakikatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan mamandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.

ULN bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat netral dan bebas nilai. ULN lebih merupakan alat atau senjata bagi negara hegemon untuk memberlakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat imperialistik dan eksploitatif terhadap negara berkembang dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingan negara hegemon melalui penguasaan atas faktor-faktor ekonomi strategis.

Hal ini hanya dapat terjadi terkecuali gagasan-gagasan dan asumsi dasar dari neoliberalisme telah terkonstruksi dengan sangat mapan di dalam pemikiran dan gagasan yang dianut oleh para perumus kebijakan tersebut, sehingga mereka memandang bahwa hanya asumsi dari paradigma inilah yang hanya dapat melahirkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang bisa mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi. Terciptanya konstruksi paradigma neoliberal ini tidak terlepas dari peranan yang sangat dari utang luar negeri sebagai alat di dalam prosesnya, struktur manusia lebih banyak ditentukan atau dibentuk gagasan-gagasan bukan oleh kekuatan materi. Begitu juga dengan identitas dan nilai-nilai yang dimiliki manusia dikonstruksikan atau merupakan produk dari gagasan-gagasan ini bukan diciptakan secara alamiah.

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang tergolong agenda neoliberalisme, baik karena pertimbangan para teknokratnya maupun akibat

tekanan kekuatan (modal) internasional. Mereka amat merekomendasikan agar Indonesia saat ini lebih konsisten dalam menerapkan kebijakan pro pasar, terutama sekali berupa kebijakan perdagangan bebas dan arus finansial bebas.

Ketergantungan Indonesia terhadap ULN membuka jalan kepentingan kekuatan pendukung neoliberalisme internasional untuk masuk secara massif di Indonesia. Namun yang lebih menarik, kekuatan neoliberal internasional, memiliki pertautan positif dengan para teknokrat-ekonom nasional yang mendominasi elit pemerintahan yang sangat memiliki paradigma liberal. Bahkan pertautan ini menjadi kolaborasi jaringan neoliberal di Indonesia. Para pendukung kebijakan neoliberal, yang dikenal dengan Mafia Berkeley, menjadi organ stimulus penerapan konsensus Washington. Secara organis, kekuatan jaringan Mafia Berkeley terus menjadi agen utama pelaksanaan agenda liberalisasi ekonomi.

Paket kebijakan Anggaran ketat dan fiskal ketat melahirkan konsekuensi pencabutan subsidi baik BBM maupun sektor publik lainnya seperti listrik dan telepon. Permintaan CGI agar Indonesia mendorong investasi asing dan perluasan swastanisasi (*private sector*) mendorong lahirnya privatisasi BUMN, bahkan privatisasi air dan penyerahan pengelolaan SDA nasional terhadap asing. Kebijakan tersebut semua dikuatkan dengan Undang-Undang yang melindungi segala tata aturan pelaksanaannya.

Keberadaan CGI dan penerapan konsensus Washington di Indonesia, setidaknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama; Keberadaan CGI sebagai *aid coordinator*, yang didominasi lembaga keuangan internasional yakni Bank Dunia, ADB dan IMF serta negara kreditor seperti Jepang, Amerika, Jerman dan Kanada, lebih cenderung digunakan sebagai wadah pertemuan yang mengakomodir kepentingan para kreditor di Indonesia. Melalui kedok bantuan dan ULN, para kreditor meminta akomodasi kepentingan masing-masing anggota CGI terhadap Indonesia dalam kepentingan ekonomi bahkan politik. CGI juga berperan sebagai forum monitoring penerapan paket kebijakan IMF terhadap Indonesia.

Kedua, ULN yang sangat sarat dengan kondisionalitas berupa SAP, merupakan penetrasi dan pintu masuk bagi anggota CGI terhadap Indonesia

Kedua, ULN yang sangat sarat dengan kondisionalitas berupa SAP, merupakan penetrasi dan pintu masuk bagi anggota CGI terhadap Indonesia melaksanakan paket kebijakan neoliberal, yakni konsensus Washington, yang tiada lain penguasaan dan bentuk hegemoni negara kreditor terhadap Indonesia

Ketiga, Ketergantungan Indonesia terhadap ULN, bukanlah sesuatu yang alamiah, ULN bukan sesuatu yang dibutuhkan, tapi diciptakan dan dikondisikan. Ketergantungan ini melahirkan hegemoni dan sebuah konstruksi sinergis antara para kolaborator penganut pemikiran liberal di Indonesia bersama kekuatan kapitalisme internasional, dalam hal ini konsorsium kreditor internasional, CGI.

Keempat, terbukti penerapan Konsensus Washington di Indonesia, adalah hasil kolaborasi kondisionalitas yang ditekankan dalam pertemuan forum CGI dan dominasi penganut paradigma neoliberal yang menguasai dan mengelilingi para pemegang kebijakan strategis. Penerapan kebijakan ini, tiada lain bentuk penguasaan sistematis terhadap sumber daya ekonomi Indonesia. Hal ini dapat ditilik, dari terbitnya berbagai Undang-Undang yang menyokong liberalisasi keuangan dan perdagangan serta perluasan swastanisasi dengan privatisasi.

B. REKOMENDASI

Dominasi kekuatan neoliberal di Indonesia dan penerapan konsensus Washington, mesti menjadi suatu cermatan yang strategis bagi peneliti selanjutnya. Keberadaan peran negara yang semakin terpinggirkan dalam konteks pengurusan terhadap warga negara, melalui pencabutan subsidi dan swastanisasi BUMN. Peran negara digantikan dengan semakin masifnya peran pasar melalui sejumlah kebijakan pro neoliberal.

Dinamika ekonomi politik Indonesia pasca reformasi yang semakin liberal, baik dalam ekonomi dan politik, seiring isu desentralisasi dan reformasi struktural patut lebih dikaji lagi dalam berbagai perspektif, sehingga muncul analisa yang lebih komprehensif dalam membedah problematika dan implikasi yang timbul setelah diberlakukannya liberalisasi dalam bidang ekonomi-politik.

Pada saat ini dan beberapa tahun kedepan, secara garis besar terdapat dua hal yang akan terus dihadapi Pemerintah Indonesia. Pertama adalah amanat untuk mengurangi ketergantungan ULN. Kedua, adalah fakta bahwa Pemerintah

Indonesia masih menghadapi dan harus mengatasi berbagai tantangan yang memerlukan dukungan pendanaan, yang dalam beberapa tahun kedepan belum sepenuhnya dapat diandalkan dari sumber-sumber domestik dengan pengelolaan secara mandiri.

Bagi peneliti selanjutnya, pembubaran CGI, pada tahun 2007, mesti ditelaah lebih detail, terutama tentang berlanjutnya ketergantungan terhadap ULN dan penerapan agenda neoliberalisme di Indonesia. Pembubaran CGI akan menarik dikaji secara fokus, bagi peneliti selanjutnya dalam kemapanan dominasi jaringan neoliberal di Indonesia, melaksanakan konsensus Washington.

Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, keterikatan ULN secara bilateral akankah cukup efektif? dalam konteks bingkai kemandirian bangsa. Seperti diungkapkan pemerintah SBY, pasca pembubaran CGI, pemerintah akan lebih fokus terhadap ULN dengan mekanisme bilateral dari pada multilateral.

